

Perbandingan Idealisme dan Pragmatisme Politik pada Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Studi Kasus Panyabungan Kota

Mhd. Fahri Harahap¹, Hotmatua Paralihan², Ernawati Br. Ginting³

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia; mhdhfhri199905@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia; hotmatuaparalihan@uinsu.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia; ernawatiginting@uinsu.ac.id

Received: 02/01/2025

Revised: 22/01/2025

Accepted: 29/01/2025

Abstract

This study examines the tension between political idealism and political pragmatism in the 2020 Mandailing Natal Regent and Vice-Regent Election, with a specific focus on Panyabungan Kota District as a locus of local democratic practice. The research addresses the question of how far idealistic political values—such as honesty, justice, and rational civic participation—are realized within the dynamics of local electoral politics. Employing a qualitative approach with a case study design, the study draws on in-depth interviews with election administrators, political party actors, and local residents, complemented by documentary analysis. The findings reveal that the electoral process was largely shaped by political pragmatism, manifested through the persistence of money politics, transactional voter behavior, and limited political awareness among segments of the electorate. These conditions indicate a substantive shift from value-oriented political engagement toward short-term, interest-driven calculations. The study argues that such dominance of pragmatism not only marginalizes political idealism but also undermines the quality of substantive local democracy. Consequently, the article underscores the urgency of strengthening political ethics and civic education as foundational elements for revitalizing democratic practices at the local level.

Keywords

Idealism; Local Democracy; Local Politics; Pragmatism; Regional Election

Corresponding Author

Mhd. Fahri Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia; mhdhfhri199905@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2), yang menyebutkan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang.” Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan arah pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum yang demokratis (Amrullah et al., 2023).

Dalam konteks pemerintahan daerah, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi wujud nyata dari kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai idealisme politik seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral terhadap kepentingan publik (Harsono, 2023).



Fenomena politik uang, kepentingan pribadi, serta rendahnya kesadaran politik masyarakat menjadi indikasi kuat dari dominasi pragmatisme politik di tingkat lokal. Hal ini tampak dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020, di mana sebagian besar masyarakat memilih bukan berdasarkan visi dan misi kandidat, melainkan karena imbalan atau kepentingan praktis jangka pendek (Riyanti et al., 2023).

Dalam konteks politik Islam, etika politik berlandaskan pada prinsip amar ma'ruf nahi munkar, keadilan, amanah, dan kejujuran. Prinsip-prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Mā'idah ayat 2 yang menegaskan pentingnya tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, serta larangan bekerja sama dalam dosa dan permusuhan (Hafis et al., 2023). "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..." (QS. Al-Mā'idah [5]: 2).

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menegaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk saling mendukung dalam kebaikan (al-birr) dan ketakwaan (at-taqwā), serta dilarang bekerja sama dalam kebatilan. Prinsip ini menjadi fondasi moral bagi pelaksanaan politik yang ideal dalam perspektif Islam, di mana kekuasaan dipandang sebagai amanah, bukan alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok (Ana et al., 2024).

Namun, realitas politik di Indonesia, termasuk di Mandailing Natal, menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari idealisme ke pragmatisme. Seperti yang dikemukakan oleh William James, pragmatisme memandang bahwa kebenaran suatu gagasan terletak pada manfaat praktisnya bagi kehidupan manusia. Dalam konteks politik, hal ini tercermin dari perilaku politisi yang lebih menekankan hasil instan dibandingkan nilai-nilai moral dan prinsip ideal (Sistyawan, 2024).

Pemilihan Kepala Daerah Mandailing Natal tahun 2020 yang diikuti oleh tiga pasangan calon menunjukkan pola pragmatisme politik yang cukup kuat. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan nomor urut satu, Jakfar Sukri Nasution dan Atika Azmi Utami Nasution, diusung oleh PKB, PKS, dan Hanura; pasangan nomor urut dua, Dahlan Hasan Nasution dan Aswin Parinduri, diusung oleh Golkar, PPP, PDIP, Nasdem, dan Berkarya; sementara pasangan nomor urut tiga, Sofwat Nasution dan Zubeir Lubis, didukung oleh Gerindra, PAN, dan Demokrat (Setiawan & Djafar, 2023).

Meskipun pasangan nomor tiga memiliki dukungan partai terbesar, hasil akhir menunjukkan bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh kekuatan politik formal, melainkan oleh strategi pragmatis dan pendekatan personal terhadap pemilih. Inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini — untuk menganalisis sejauh mana nilai idealisme dan pragmatisme memengaruhi dinamika politik lokal di Panyabungan Kota.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial-politik secara mendalam dan kontekstual. Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, karena wilayah ini merupakan pusat aktivitas politik dan pemerintahan daerah sehingga relevan untuk mengkaji dinamika yang diteliti. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder (Nurrisa et al., 2025). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), tokoh partai politik, serta masyarakat di Panyabungan Kota yang terlibat atau terdampak langsung oleh proses politik. Sementara

itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen resmi KPU, hasil rekapitulasi suara, artikel ilmiah, serta literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian (Sari et al., 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung fenomena politik yang terjadi di lapangan, sedangkan wawancara mendalam dilakukan dengan pendekatan snowball sampling agar peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih luas dan mendalam melalui rekomendasi dari informan sebelumnya. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari observasi dan wawancara melalui arsip serta publikasi resmi. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel, serta penarikan kesimpulan secara induktif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pilkada Mandailing Natal Tahun 2020

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 menjadi salah satu peristiwa politik lokal yang menarik untuk dianalisis karena memperlihatkan dinamika kontestasi yang cukup kompetitif. Pemilihan ini diikuti oleh tiga pasangan calon yang masing-masing didukung oleh koalisi partai politik dengan konfigurasi kekuatan yang berbeda. Kondisi tersebut mencerminkan pluralitas pilihan politik masyarakat Mandailing Natal serta menunjukkan bahwa arena politik lokal tidak bersifat homogen, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, kultural, dan historis.

Berdasarkan data resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal, pasangan Jakfar Sukri Nasution dan Atika Azmi Utami Nasution yang diusung oleh PKB, PKS, dan Hanura memperoleh suara terbanyak, yaitu 78.859 suara. Perolehan ini menempatkan mereka sebagai pemenang dalam kontestasi Pilkada 2020. Meskipun koalisi partai pengusung pasangan ini tidak tergolong sebagai koalisi dengan jumlah partai terbesar, hasil pemilihan menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap pasangan ini cukup signifikan dan merata di berbagai wilayah.

Pasangan calon nomor urut dua, Dahlan Hasan Nasution dan Aswin Parinduri, yang didukung oleh koalisi besar terdiri atas Golkar, PPP, PDIP, NasDem, dan Berkarya, memperoleh 75.861 suara. Selisih suara dengan pasangan pemenang relatif tipis, sehingga memperlihatkan kuatnya persaingan di antara kedua pasangan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya jumlah partai pengusung tidak secara otomatis menjamin kemenangan, terutama dalam konteks politik lokal yang sangat dipengaruhi oleh figur dan kedekatan sosial kandidat.

Sementara itu, pasangan Sofwat Nasution dan Zubeir Lubis yang diusung oleh Partai Gerindra, PAN, dan Demokrat memperoleh 69.175 suara. Meskipun berada pada posisi ketiga, perolehan suara pasangan ini tetap menunjukkan adanya basis pemilih yang cukup solid. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga pasangan calon memiliki segmentasi pemilih masing-masing, sehingga tidak ada satu kekuatan politik yang benar-benar dominan dalam Pilkada Mandailing Natal tahun 2020.

Selisih suara yang relatif tipis antara pasangan nomor urut satu dan dua menegaskan bahwa kontestasi Pilkada 2020 berlangsung secara kompetitif dan ketat. Dalam konteks ini, setiap strategi kampanye, pendekatan kepada pemilih, serta kemampuan membaca kondisi sosial masyarakat menjadi faktor penentu. Sebagai mahasiswa yang mengamati perkembangan politik daerah, penulis melihat bahwa preferensi pemilih tidak semata-mata didasarkan pada afiliasi partai, tetapi juga pada rekam jejak dan citra personal calon (Muhajir & Wulandari, 2023).

Kondisi sosial dan budaya masyarakat Mandailing Natal turut memainkan peran penting dalam menentukan pilihan politik. Ikatan kekerabatan, kedekatan emosional, serta hubungan sosial yang terbangun antara kandidat dan masyarakat menjadi modal politik yang sangat berpengaruh. Dalam masyarakat yang masih kuat dengan nilai-nilai komunal, figur pemimpin yang dianggap dekat dan memahami kebutuhan masyarakat cenderung lebih mudah mendapatkan kepercayaan pemilih (Hermawan & Murjoko, 2025).

Selain itu, jaringan sosial dan politik yang dibangun kandidat di tingkat akar rumput juga menjadi faktor kunci dalam memenangkan dukungan. Pasangan pemenang dinilai mampu mengoptimalkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan relawan dalam menyampaikan visi dan program kepada masyarakat. Strategi ini terbukti efektif dalam memobilisasi suara, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki kedekatan sosial yang kuat dengan kandidat (Lesmana et al., 2025).

Dari sisi partai politik, Pilkada Mandailing Natal tahun 2020 menunjukkan bahwa peran partai lebih berfungsi sebagai kendaraan politik dibandingkan sebagai penentu utama pilihan pemilih. Banyak pemilih yang cenderung memilih berdasarkan figur calon, bukan semata-mata identitas partai pengusung. Fenomena ini sejalan dengan kecenderungan politik lokal di Indonesia, di mana personalisasi politik masih sangat dominan.

Hasil Pilkada 2020 ini juga mencerminkan tingkat kedewasaan politik masyarakat Mandailing Natal yang semakin berkembang. Pemilih tidak sepenuhnya terikat pada satu partai politik tertentu, tetapi lebih rasional dalam menilai calon berdasarkan program, visi, serta kedekatan sosial. Hal ini menjadi indikator positif bagi perkembangan demokrasi lokal yang lebih substantif.

Secara keseluruhan, Pilkada Mandailing Natal tahun 2020 memberikan gambaran bahwa dinamika politik lokal sangat kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui kekuatan partai politik semata. Kemenangan pasangan Jakfar Sukri Nasution dan Atika Azmi Utami Nasution menunjukkan pentingnya kombinasi antara strategi politik, kekuatan jaringan sosial, serta kemampuan kandidat membangun hubungan yang dekat dengan masyarakat. Temuan ini menjadi pelajaran penting bagi studi politik lokal dan dapat menjadi referensi dalam memahami pola perilaku pemilih di daerah.

Dominasi Pragmatisme dalam Perilaku Politik Masyarakat

Hasil wawancara dengan salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal, Bapak Rahmad Hidayat, menunjukkan bahwa praktik politik uang masih menjadi persoalan serius dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Meskipun KPU telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dan pengawasan, praktik tersebut tetap berlangsung dalam bentuk yang lebih terselubung, seperti pemberian sembako dan uang transport kepada masyarakat. Menurut beliau, bentuk-bentuk tersebut kerap dianggap wajar oleh masyarakat menjelang pemilihan, sehingga sulit untuk dikategorikan sebagai pelanggaran oleh sebagian pemilih. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum pemilu dan praktik politik yang berkembang di tingkat akar rumput (Wawancara dengan Rahmat Hidayat, 2021).

Berdasarkan pengamatan di lapangan, praktik politik uang tidak selalu dipersepsikan sebagai tindakan yang melanggar etika demokrasi. Sebaliknya, sebagian masyarakat memaknainya sebagai bentuk kepedulian kandidat terhadap kondisi ekonomi mereka (Marpaung et al., 2024). Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Rahmad Hidayat yang menegaskan bahwa penerimaan masyarakat terhadap pemberian materi menjadi salah satu faktor utama sulitnya memberantas politik uang. Dalam konteks ini, pengawasan formal yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu belum sepenuhnya mampu menjangkau dimensi kultural dan sosial yang melingkupi perilaku politik masyarakat.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh seorang warga Kelurahan Kayujati, Ibu Nursiah, yang menyatakan bahwa masyarakat cenderung menilai calon pemimpin dari manfaat langsung yang dapat dirasakan. Pernyataan “kalau ada yang kasih uang atau sembako, berarti mereka peduli”

mencerminkan pola pikir pragmatis yang berkembang di tengah masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa relasi antara kandidat dan pemilih lebih banyak dibangun atas dasar kebutuhan jangka pendek, bukan pada pertimbangan visi, program, atau integritas calon (Wawancara dengan Nursiah, 2021).

Secara empiris, kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek material masih menjadi indikator utama kepedulian politik di mata sebagian pemilih. Masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas cenderung lebih responsif terhadap bantuan langsung dibandingkan janji program jangka panjang. Fakta lapangan ini memperkuat asumsi bahwa faktor ekonomi berperan signifikan dalam membentuk perilaku memilih, khususnya di wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang relatif rendah (Bakhtiar et al., 2025).

Temuan penelitian ini juga mengindikasikan adanya pergeseran makna politik di tingkat lokal. Politik tidak lagi dipahami sebagai sarana kolektif untuk memperjuangkan kepentingan publik, melainkan sebagai arena pertukaran kepentingan yang bersifat transaksional (Darajat et al., 2025). Dalam praktiknya, suara pemilih diposisikan sebagai komoditas yang dapat ditukar dengan bantuan materi, baik dalam bentuk uang tunai maupun kebutuhan pokok sehari-hari (Pora et al., 2025).

Dalam kerangka idealisme demokrasi, praktik semacam ini menunjukkan kemunduran nilai-nilai partisipasi politik yang rasional dan beretika. Pemilih seharusnya menggunakan hak pilih berdasarkan pertimbangan program, rekam jejak, dan kapasitas kepemimpinan calon. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa pertimbangan tersebut sering kali dikalahkan oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak dan minimnya pemahaman politik (Heeng et al., 2025).

Pandangan ini sejalan dengan analisis Eep Saefulloh Fatah yang menyatakan bahwa pragmatisme politik di Indonesia tumbuh akibat lemahnya pendidikan politik dan kuatnya budaya patronasi. Dalam budaya patronasi, hubungan antara pemimpin dan rakyat dibangun dalam logika timbal balik material, di mana dukungan politik diberikan sebagai imbalan atas bantuan atau fasilitas yang diterima. Temuan lapangan di Mandailing Natal memperlihatkan bahwa pola patronasi ini masih mengakar kuat dalam praktik politik lokal (Syauqi et al., 2024).

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya pendidikan politik yang dilakukan belum mampu mengubah pola pikir masyarakat secara signifikan. Sosialisasi pemilu cenderung bersifat normatif dan prosedural, sementara aspek nilai dan etika demokrasi belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Akibatnya, praktik politik uang terus berulang dari satu pemilihan ke pemilihan berikutnya.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa politik uang di Mandailing Natal bukan sekadar persoalan pelanggaran aturan pemilu, tetapi juga merupakan persoalan struktural dan kultural. Pragmatisme politik yang berkembang di masyarakat mencerminkan lemahnya internalisasi nilai-nilai demokrasi substantif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendidikan politik yang berkelanjutan dan kontekstual agar masyarakat dapat memaknai politik sebagai ruang perjuangan kepentingan publik, bukan sekadar pertukaran kepentingan material.

Idealisme Politik: Upaya yang Terpinggirkan

Meskipun praktik pragmatisme politik cenderung mendominasi perilaku pemilih, temuan lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat aktor politik yang berupaya mempertahankan nilai-nilai idealisme dalam kontestasi elektoral. Hal ini tercermin dari pernyataan salah satu pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mandailing Natal, H. Marwan Lubis, yang menegaskan komitmen partainya terhadap politik dakwah dan politik bersih. Namun demikian, ia juga mengakui bahwa upaya tersebut kerap berhadapan dengan preferensi masyarakat yang lebih mengutamakan manfaat material yang dapat dirasakan secara langsung. Pernyataan ini mengindikasikan adanya ketegangan struktural antara visi normatif partai politik dan realitas sosial-ekonomi pemilih di tingkat lokal.

Secara empiris, temuan ini memperlihatkan bahwa idealisme politik belum sepenuhnya memiliki daya tawar yang kuat dalam memengaruhi pilihan politik masyarakat. Dalam konteks Mandailing Natal, politik nilai dan gagasan sering kali kalah bersaing dengan politik manfaat langsung. Kondisi ini bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya komitmen moral aktor politik, melainkan juga oleh tekanan struktural berupa kondisi ekonomi masyarakat yang masih rentan serta terbatasnya literasi politik. Akibatnya, narasi politik berbasis moral dan program jangka panjang sulit diterjemahkan menjadi pilihan elektoral yang rasional bagi sebagian pemilih (Ghofur et al., 2025).

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui kerangka teoritis Appadurai tentang *moral decay*, yakni melemahnya komitmen moral dalam praktik sosial dan politik akibat dominasi kepentingan pragmatis. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, *moral decay* tercermin pada bergesernya orientasi politik dari perjuangan nilai dan kepentingan publik menuju transaksi kepentingan jangka pendek. Politik tidak lagi dimaknai sebagai proses deliberatif untuk menentukan arah pembangunan daerah, melainkan sebagai arena distribusi manfaat material yang bersifat temporer (Damayanti & Fauzi, 2022).

Dari sisi kandidat dan elite politik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa idealisme sering kali dikompromikan demi efektivitas strategi elektoral. Pengakuan seorang anggota tim sukses yang menyatakan bahwa penyampaian visi dan program harus disertai dengan bantuan langsung menggambarkan dilema yang dihadapi kandidat (Hidayat et al., 2025). Dalam situasi di mana masyarakat menuntut bukti konkret, kandidat cenderung menyesuaikan pendekatan kampanye agar pesan politik dapat diterima. Praktik ini menunjukkan bahwa pragmatisme tidak hanya lahir dari bawah, tetapi juga direproduksi secara sadar oleh elite politik sebagai respons terhadap tuntutan sosial (Fahriani et al., 2025).

Sebagai akademisi politik, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk rasionalitas instrumental dalam kontestasi elektoral. Elite politik bertindak berdasarkan kalkulasi untung-rugi untuk memaksimalkan perolehan suara, bahkan jika hal tersebut mengharuskan mereka mengurangi penekanan pada nilai-nilai ideal. Dalam teori pilihan rasional, perilaku semacam ini dianggap wajar, namun dalam perspektif demokrasi normatif, praktik tersebut berpotensi mereduksi kualitas demokrasi karena mengaburkan batas antara kepedulian sosial dan transaksi politik (Nasution et al., 2020).

Temuan ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara perilaku pemilih dan strategi elite. Preferensi masyarakat terhadap manfaat langsung mendorong elite untuk mengadopsi strategi pragmatis, sementara strategi elite tersebut pada gilirannya memperkuat pola pikir transaksional di kalangan pemilih. Siklus ini menciptakan kondisi yang sulit diputus, karena kedua belah pihak saling menyesuaikan diri dalam kerangka pragmatisme politik (Dwitama et al., 2022).

Dalam perspektif pembangunan demokrasi lokal, kondisi ini menjadi tantangan serius. Demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya kompetisi gagasan, ada program, serta partisipasi politik yang didasarkan pada kesadaran dan pertimbangan rasional. Namun, dominasi pragmatisme menyebabkan ruang deliberasi publik menjadi sempit dan fokus politik bergeser pada distribusi manfaat sesaat. Akibatnya, akuntabilitas jangka panjang pemimpin terpilih terhadap janji dan program pembangunan menjadi lemah (Hamid, 2025; Sagita, 2025).

hasil penelitian ini menegaskan bahwa penguatan idealisme politik tidak dapat dibebankan semata-mata kepada partai atau kandidat yang memiliki komitmen moral. Diperlukan intervensi yang lebih sistematis melalui pendidikan politik yang berkelanjutan, penguatan peran masyarakat sipil, serta keteladanan elite politik dalam menegakkan etika demokrasi. Tanpa upaya tersebut, pragmatisme akan terus menjadi strategi dominan dalam politik lokal dan memperdalam gejala moral decay dalam praktik demokrasi di tingkat daerah (Despriadi et al., 2023; Merlita et al., 2025).

pragmatisme dan idealisme bukanlah dua kutub yang sepenuhnya terpisah, melainkan berada dalam relasi yang saling memengaruhi. Tantangan utama demokrasi lokal di Mandailing Natal bukan

hanya mengurangi praktik politik transaksional, tetapi juga membangun kondisi sosial dan politik yang memungkinkan nilai-nilai idealisme memiliki relevansi dan daya tarik nyata bagi masyarakat.

Dampak Pragmatisme terhadap Kualitas Demokrasi Lokal

Dominasi pragmatisme politik dalam kontestasi elektoral lokal berimplikasi langsung pada menurunnya kualitas demokrasi substantif. Praktik politik uang, loyalitas politik yang dibangun atas dasar kepentingan material, serta rendahnya kesadaran rasional masyarakat menyebabkan proses seleksi kepemimpinan tidak lagi berbasis pada kompetensi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan. Akibatnya, pemimpin terpilih lebih sering merepresentasikan kekuatan modal dan jaringan transaksional dibandingkan aspirasi publik yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang (Affandi & Katimin, 2025).

Burhan Bungin menegaskan bahwa perilaku politik yang bersifat pragmatis dan transaksional menghambat terbentuknya budaya politik yang sehat, karena masyarakat tidak didorong untuk berpikir kritis dan rasional dalam menggunakan hak pilihnya. Dalam kondisi demikian, demokrasi kehilangan dimensi edukatifnya dan hanya berfungsi sebagai prosedur formal untuk memilih pemimpin, tanpa diiringi internalisasi nilai-nilai moral dan etika politik. Demokrasi yang seharusnya menjadi sarana pembelajaran kolektif justru tereduksi menjadi rutinitas elektoral lima tahunan (Despriadi et al., 2023).

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Miriam Budiardjo, yang menyatakan bahwa kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran politik warga negara. Menurutnya, tanpa kesadaran politik yang matang, demokrasi mudah terjebak pada praktik manipulatif dan populisme dangkal. Dalam konteks politik lokal, rendahnya kesadaran tersebut membuka ruang bagi praktik politik uang untuk terus direproduksi, karena pemilih tidak menempatkan hak pilihnya sebagai instrumen kontrol terhadap kekuasaan (Sagita, 2025).

Eep Saefulloh Fatah juga menekankan bahwa pragmatisme politik di Indonesia berakar pada kuatnya budaya patronase dan lemahnya pendidikan politik. Relasi antara elite dan masyarakat cenderung dibangun dalam pola “balas jasa”, di mana dukungan politik diberikan sebagai imbalan atas bantuan material. Pola ini tidak hanya merusak etika demokrasi, tetapi juga melanggengkan ketergantungan masyarakat pada elite politik, sehingga posisi tawar publik dalam proses politik menjadi lemah (Affandi & Katimin, 2025).

Dari perspektif demokrasi deliberatif sebagaimana dikemukakan oleh Jurgen Habermas, kondisi tersebut menunjukkan absennya ruang diskursus publik yang rasional. Idealnya, pilihan politik lahir dari proses komunikasi yang argumentatif, berbasis pada pertukaran gagasan dan kepentingan bersama. Namun, dominasi pragmatisme menyebabkan ruang deliberasi digantikan oleh transaksi, sehingga rasionalitas komunikatif tergeser oleh rasionalitas instrumental (Setiawan & Djafar, 2023).

Dalam konteks Indonesia, Mochtar Mas’oed juga mengingatkan bahwa demokrasi prosedural tanpa fondasi budaya politik yang kuat akan melahirkan apa yang disebut sebagai *demokrasi semu*. Pemilu memang berlangsung secara reguler dan sah secara hukum, tetapi tidak menghasilkan kepemimpinan yang akuntabel dan responsif terhadap kepentingan rakyat. Temuan lapangan dalam penelitian ini memperkuat argumen tersebut, khususnya pada level politik lokal (Sistiyawan, 2024).

Oleh karena itu, pendidikan politik yang berkelanjutan menjadi prasyarat penting untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Pendidikan politik tidak boleh dipahami secara sempit sebagai sosialisasi teknis pemilu, melainkan sebagai proses jangka panjang untuk membangun kesadaran kritis, etika politik, dan orientasi kepentingan publik. Tanpa pendidikan politik yang memadai, masyarakat akan terus berada dalam lingkaran pragmatisme dan politik transaksional (Damayanti & Fauzi, 2022).

Sebagaimana ditegaskan oleh Ramlan Surbakti, pendidikan politik yang efektif harus melibatkan negara, partai politik, lembaga penyelenggara pemilu, serta masyarakat sipil secara simultan.

Tujuannya adalah membentuk warga negara yang tidak hanya partisipatif, tetapi juga rasional dan bertanggung jawab dalam menentukan pilihan politik. Dengan meningkatnya literasi politik, masyarakat diharapkan mampu menilai kandidat berdasarkan integritas, rekam jejak, dan visi pembangunan daerah (Lesmana et al., 2025).

Dengan demikian, penguatan pendidikan politik merupakan strategi kunci untuk memutus mata rantai pragmatisme politik di tingkat lokal. Demokrasi yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila pemilih memiliki kesadaran bahwa suara mereka bukan sekadar alat tukar kepentingan sesaat, melainkan instrumen moral dan politik untuk menentukan arah masa depan pemerintahan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 di Kecamatan Panyabungan Kota lebih didominasi oleh pragmatisme politik yang bekerja secara struktural dan relasional, sehingga menyingkirkan peran idealisme politik dalam praktik demokrasi lokal. Pragmatisme tidak hanya tercermin dari perilaku pemilih, tetapi juga direproduksi secara sadar oleh elite politik dan tim sukses melalui normalisasi bantuan material sebagai bentuk kepedulian politik. Meskipun demikian, keberadaan aktor-aktor yang tetap berpegang pada nilai integritas, kejujuran, dan visi jangka panjang menunjukkan bahwa idealisme politik belum sepenuhnya hilang. Dalam perspektif etika politik Islam, kekuasaan merupakan amanah yang menuntut keadilan dan tanggung jawab moral, sehingga masa depan demokrasi lokal masih terbuka untuk diperbaiki melalui penguatan etika publik dan komitmen nilai dalam praktik politik.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi komparatif lintas daerah guna mengidentifikasi pola dan variasi struktural pragmatisme politik dalam konteks lokal yang berbeda. Selain itu, penggunaan pendekatan longitudinal atau metode campuran dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh pendidikan politik, peran masyarakat sipil, dan internalisasi nilai-nilai keagamaan terhadap perubahan perilaku politik masyarakat dalam jangka panjang.

REFERENSI

- Affandi, R., & Katimin, K. (2025). Idealisme Politik Generasi Milenial (Optimisme dan Pesimisme dalam Arah Baru Demokrasi Indonesia). *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 316–322. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i2.5296>
- Amrullah, A., Umar, U., & Suharli, L. (2023). Pengaruh Strategi Komunikasi Politik terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dengan Perilaku Pemilih sebagai Variabel Moderasi dalam Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 di Kota Sumbawa. *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(5), 2922–2930. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i5.1984>
- Ana, A. O., Hidayah, M. N., & Nurgiansyah, T. H. (2024). Partisipasi Politik dan Warga Negara Sebagai Makhluq di Indonesia. *Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(1), 55–60. <https://doi.org/10.26418/SKJPI.V4I1.59246>
- Bakhtiar, B., Sakman, S., Randiawan, R., & Ridhoh, M. Y. (2025). Penguatan Karakter Komunikasi Politik Berbasis Ideologi Politik Partai. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 10(1), 219–232. <https://doi.org/10.21067/jmk.v10i1.11781>
- Damayanti, A. S., & Fauzi, A. M. (2022). Partisipasi Politik dan perilaku Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Desa (Pada Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo). *Law, Development and Justice Review*, 5(2), 228–236. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i2.17215>
- Darajat, M. I., Katimin, K., & Paralihan, H. (2025). Etika Politik dalam Pengurusan Partai Demokrasi

- Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Sumatera Utara. *Polyscopia*, 2(1), 87–94.
<https://doi.org/10.57251/polyscopia.v2i1.1626>
- Despriadi, D., Murdiati, E., & Yahya, A. H. (2023). Citra Jurnalis di Kalangan Warga Pedamaran 6 tentang Idealisme Jurnalistik dan Pragmatisme Politik. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 1(1), 30–33. <https://doi.org/10.62379/jiksp.v1i2.130>
- Dwitama, M. I., Hakiki, F. A., Sulastri, E., Usni, U., & Gunanto, D. (2022). Media Sosial dan Pengaruhnya terhadap Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada 2020 Tangerang Selatan. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 3(1), 53–66.
<https://doi.org/10.24853/independen.3.1.53-66>
- Fahriani, Razak, N. K., & Ratnawati, R. (2025). Penggunaan Metafora dan Makna dalam Diskursus Politik pada Media Sosial (Kajian Pragmatik). *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 5(2), 967–982. <https://doi.org/10.53769/DEIKTIS.V5I2.1642>
- Ghofur, A., Pohan, K. N. K., Azizah, R. N., Alena, K. P., Octaviani, Z., & Hadinugroho, D. S. (2025). Konflik Internal Partai Politik: Analisis Lahirnya Partai Gelora Sebagai Dampak Pecahnya Partai Keadilan Sejahtera. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 12.
<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2643>
- Hafis, M. A., Amin, M., & Situmorang, T. P. (2023). Partisipasi Politik Masyarakat Medan Deli dalam Pemilihan Walikota di Masa Pandemi Tahun 2020. *PERSPEKTIF*, 12(1), 263–277.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8411>
- Hamid, R. (2025). Fiqih Siyasah dan Kesadaran Politik Mahasiswa Muslim: Studi di UIN Sunan Kalijaga. *Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif*, 6(4).
<https://ejournals.com/ojs/index.php/jpa/article/view/3805>
- Harsono, H. (2023). Politik Identitas dan Partisipasi Politik di Media Sosial: Analisis Model Struktural pada Generasi Z di Kota Malang. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4(2), 166–187. <https://doi.org/10.46874/tkp.v4i2.752>
- Heeng, G., Panide, R. D. Y., & Zega, Y. K. (2025). Implikasi Aliran Filsafat Idealisme terhadap Praksis Pendidikan Agama Kristen. *Jurnal Salvation*, 4(1), 30–46.
<https://doi.org/10.56175/salvation.v4i1.25>
- Hermawan, N., & Murjoko, A. (2025). Reaktualisasi Dakwah Politik di Indonesia: Antara Warisan Khilafah dan Realitas Demokrasi Modern. *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, 7(2), 954–975.
<https://doi.org/10.61227/arji.v7i2.398>
- Hidayat, P. H., Arifinsyah, A., & Sahrin, A. (2025). Program Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Pembinaan Politik Masyarakat Kabupaten Deli Serdang. *Polyscopia*, 2(2), 112–121.
<https://doi.org/10.57251/polyscopia.v3i2.1658>
- Lesmana, I., Hidayat, M. P., & Latua, A. (2025). Perbandingan Sistem Pemerintahan Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan Pemerintahan Indonesia Perspektif Politik Profetik Kuntowijoyo. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2), 330–337.
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.15521551>
- Marpaung, A., Harifin, H., Zebua, I., & Sinaga, R. (2024). The Impact of the Ethical Policy on the Development of Education in Early 20th Century Indonesia. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 5(2), 208–214. <https://doi.org/10.34007/warisan.v5i2.2389>
- Merlita, L., Shidiq, M., Kardiyo, K., Ramedlon, R., & Syamsudin, S. (2025). Perbandingan Berbagai Aliran dan Macam-Macam Ideology dalam Pendidikan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 845–860. <https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.V5I3.18798>
- Muhajir, A., & Wulandari, F. (2023). Demokrasi Oligarkis dan Resesi Demokrasi di Indonesia Pasca-Suharto: Sebuah Tinjauan Sejarah Politik. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.34007/warisan.v4i1.1876>
- Nasution, F. A., Thamrin, M. H., & Ritonga, A. D. (2020). Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kota Medan terhadap Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 12(2), 97–113. <https://doi.org/10.32734/politeia.v12i2.3955>

- Nurrisa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data . *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(3), 793–800. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jtpp/article/view/581>
- Pora, S., Kanuna, R. S., Muksin, D., Nofrima, S., & Priyanto, A. (2025). Politik Mahar dan Sentralisasi Partai: Analisis Motif Dukungan PKB pada Pilkada Kepulauan Sula 2020. *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 8(2), 118–130. <https://doi.org/10.36624/jisora.v8i2.295>
- Riyanti, R., Luthfi, A., & Rohana, D. (2023). Peran Generasi Muda dalam Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik. *Themis : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 26–31. <https://doi.org/10.70437/themis.v1i1.330>
- Sagita, A. (2025). Charismatic Leadership dan Demokrasi Substantif dalam Studi Faksi Politik Pasca Reformasi di Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 13–22. <https://doi.org/10.33648/JTM.V6I1.510>
- Sari, A. R., Husnawati, H., Suryono, J., Marzuki, M., & Mulyapradana, A. (2025). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D. In *YPAD Penerbit*. YPAD . <https://journal.yayasanpad.org/index.php/ypadbook/article/view/432>
- Setiawan, H. D., & Djafar, TB. M. (2023). Partisipasi Politik Pemilih Muda dalam Pelaksanaan Demokrasi di Pemilu 2024. *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 201. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2877>
- Sistyawan, D. J. (2024). Partisipasi Politik dan Perilaku Masyarakat dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Temanggung. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 144–158. <https://journal-fis.um.ac.id/index.php/jipppk/article/view/881>
- Syauqi, M. A., Ali, A., & Kartika, R. (2024). Pengembangan Bahan Ajar Teks Debat Berbasis Sosial Politik Siswa Kelas X SMA. *Sintaks: Jurnal Bahasa & Sastra Indonesia*, 4(1), 26–30. <https://doi.org/10.57251/sin.v4i1.1211>